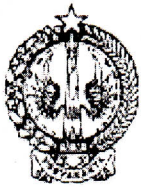


LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

215

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/8605/V/10/2012

Membaca Surat : Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNY Nomor : 2579/UN.34.14/PL/2012
Tanggal : 29 Oktober 2012 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : DESI ARIANI NIP/NIM : 08401244017
Alamat : Karangmalang Yogyakarta
Judul : PERAN INSTITUTE FOR RESEARCH AND EMPOWERMENT DALAM PEMBANGUNAN POLITIK DI DESA WUKIRSARI, KECAMATAN IMOIRI, BANTUL, YOGYAKARTA (STUDI ANALISIS WACANA KRITIS DENGAN MODEL VAN DIJK)
Lokasi : Desa Wukirsari Kota/Kab. BANTUL
Waktu : 30 Oktober 2012 s/d 30 Januari 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 30 Oktober 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Bantul c/q Ka. Bappeda
3. Dekan Fak. Ilmu Sosial UNY
4. Yang Bersangkutan

Hendar Susilowati, SH
NIP. 19580120 198503 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN IMOIRI
DESA WUKIRSARI

Alamat : Nogosari I Wukirsari Imogiri Bantul No Telp : 02746460914

SURAT KETERANGAN

No : 070 / 004

Dengan ini kami selaku Pemerintah Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul Menerangkan Bahwa :

Nama : DESI ARIANI
P. Tinggi : UNY, Karangmalang Yogyakarta
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial
NIM : 08401244017

Telah mengadakan dan menyelesaikan Penelitian di wilayah Desa Wukirsari mulai tanggal 26 November 2012 sampai dengan 14 Desember 2012 dengan tema / judul “ **PERAN INSTITUTE RESEARCH AND EMPOWERMENT YOGYAKARTA DALAM PEMBANGUNAN POLITIK DI DESA WUKIRSARI, KECAMATAN IMOIRI, BANTUL, YOGYAKARTA** (studi analis wacana kritis dengan model Van Djik).

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wukirsari, 11 Januari 2013

LURAH DESA



AGUS BASUKI TAPIP.S.Ag

**SURAT KETERANGAN**

No: 0048/IRE/XI/2012

Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Desi Arian
NIM : 08401244017
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Dengan ini yang bersangkutan di atas pernah melakukan penelitian Kualitatif dengan analisis wacana kritis model van dijk di IRE Yogyakarta mulai 01 November 2012 sampai dengan 23 November 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 November 2012
Hormat kami,


Hesti Rinandari
Deputi Administrasi dan Keuangan

**INSTITUTE FOR RESEARCH
AND EMPOWERMENT**

Transkrip Wawancara dengan Sunaji Zamroni Aktivis IRE Yogyakarta

Tanggal 12 November 2012 di Ruang Tamu IRE Yogyakarta pukul 13.50 WIB

Program program Pengembangan *Good Governance* Dalam Konteks Otonomi Desa

Maksudnya IRE mengkampanyakan bahwasannya yang namanya menata mengelola pemerintahan, tidak semata-mata bersumber dari pemerintah desa dari pamong apo tidak hanya dari elit desa tapi bisa juga, mengelola pemerintahan adanya kebaikan-kebaikan bersama, itu bersumber dari masyarakat: 1.masyarakat itu sipil, ya karangtaruna, organsasi NU, Kelompok Yasinan...2.Bisa juga dari pelaku ekonomi, misalnya Blantik, gurah, trus pedagang kelontong, kalau pengajin di wukirsari batik atau tatah sungging, 3. Termasuk juga dalam masyarakat politik yaitu badan perwakilan desa,lurah, intine mengelola pemerntahan desa, dalam hal ini desa tidak kudhu pak lurah, ora kudhu pamong desa, nek iso kebaikanusul-usul pemeikiran itu,

BPD bisa dari masyarakat pemerintah, ada pilar *good governce* sehingga sumber-sumber kebajikan-kebajikan di desa itu tidak semata-mata, tidak harus datang dari lurah atau pamong desa, tapi BPD, anggota yasinan, pegadang. Lalu BPD itu kan penyelenggara pemerintahan, kalau pakai akhiran an itu terdiri dari pemerintah desa, lurah, pamong-pamong plus BPD. Tapi kalau lurah dan pamong desa itu disebut pemerintah desa.

Lurah dan BPD kinerjanya saling melengkapi, zaman dulu sejak UU No 22 tahun 1999 pegertian dan posisi BPD mirip seperti DPR di kabupaten propinsi atau di desa. namanya saja Badan Perwakilan Desa jadi dia lembaga representasi perwakilan dari dusun-dusun, kelompok masyarakat itu, punya kewenangan yaitu: Legislasi, budgeting sama controlling. Dan sekerang dengan bergantinya UU 22 tahun 1999 menjadi UU 32 tahun 2004 kuwi BPD bukan lagi menjadi seperti dulu lagi. Badan Perwakilan desa berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Jadi lebih bermakana

hanya sebagai lembaga sebagai organisasi Desa untuk bermusyawatan dan fungsinya agak menyurut dari pada fungsi-fungsi yang lain, itu BPD yang sekarang.

Nah itu dulu kita kampanyekan ke BPD, masyarakat pelaku ekonomi, kita latih jadi ada namanya lokarya dan pelatihan. Kita latih di tempat-tempat pertemuan seperti gedung-gedung yang representative. Tujuannya untuk *transfer knowledge*. Mereka kita kasih pemahaman tentang *good governance* seperti apa, prakteknya seperti apa, hubungan antara masyarakat desa dan pemerintah seperti apa. BPD juga seperti apa.

Tapi pemerintah desa sendiri diikutkan dilatih. Jadi BPD *dewe*, masyarakat *dewe*, setelah pelatihan, trus didampingi. Kan mereka pulang, lalu berfikir atau latihan *apa yo dinengke wae...*

Agar itu tidak lepas dan itu bisa mengendap dan dipraktikkan oleh mereka yang mengikuti pelatihan. Makanya perlu dilatih proses pendampingan, untuk mengawal, dilatih diyakinkan....'' *Piye pak,? Nek aku kon aktif neng pemerintahan desa urusan ku dewe piye mas?* Maka perlu diyakinkan. Karena salah satunya materinya dan begitu, bagaimana masyarakat aktif ikut dalam tata kelola pemerintahan desa. *Nek wis muleh ngono, wah piye kuwi angel..''*

Pelatihan sendiri pun hanya perakilannya saja. Harapannya *muleh nularke 'gethok tular*. Nah Pendampingan itu sendiri berfungsi agar *wong-wong ki do yakin* dengan pengetahuan itu dan mau untuk mempraktekan dan mau juga mengelola. Yang dijadikan untuk kegiatan promosi itu menyebar di dusun-dusun yang sering yaitu:

- a. Giriloyo dengan pak kyai asmuni
- b. Manggung dengan bapak bambang sebagai kadus/dukuh
- c. Pucung bapak mantan lurah
- d. Nogosari 2 mas supratman

Setelah didampingi kemudian mereka dipertemukan dlatih ‘*trus iki piye* ‘ Beetemu itu untuk membahas yang namaya lokakarya desa itu untuk memepertumkan ide-ide. Misalnya masyarakat sipil idenya apa, masyarakat ekonomi ide nya apa, BPD idenya apa, pemerintah sendri apa untuk membangun misale urusan sosial kemasyarakatan kayak apo, pembangunan kayak apa, pemerintahan seerti apa. Nah itu kan pemerintahan: “ *nek iso iki pamong desa mangkate jam pitu muleh jam 1*”

Kesepakatan-kesepakatan itu muncul dari masyarakat itu sendiri, seperti yang yan sudah disebut tadi. Yang namanya *good govence* itu suatu konsep menyatukan sumber-sumber kebijakan dalam pemerintahan itu tidak melulu, tidak semata-mata bersumber dari lurah, pamong desa. Dalam konsep itu

Sumber kebijakan itu selain yang disebutkan tadi. Kebjakan itu ‘pasti’ kapan pamong desa berangkat ke kantor.

- Kenapa IRE Yogyakarta dijadikan sasaran promosi good govence salah satunya di Wukirsari?
- + ya itu hanya piloting project dan kebetulan dulu itu punya kontak person dengan mereka.

Kami juga pertimbangkan juga dimana pemerintah desa, masyarakat desa, *well come* mau kita ‘istlahnya promosikan tentang desa. *Yo nek* misalnya lurah atau pemerintah desanya ogah-ogahan. Kita kerjasama model-model gelem atau tidak.

Pentingnya Kampanye good governance

+ kenapa IRE melihat penting promosi good governance itu?

- Itu hanya apa ya'' instrumen untuk, *good governance* sendiri itu kan juga atau suatu klausul yang *debatable* berbau neo liberalisme kuat sangat kuat, tapi dibalik itu memang ada suatu upaya untuk mempromosikan tentang pentingnya *power and sharing* antara politisi, masyarakat dan pelaku bisnis. Ini kan menjadi konsep universal juga di dalam nilai-nilai demokrasi egaliter, kebersamaan, egalitarian, persamaan, kebebasan, menyuarakan pendapat, berpartisipasi dalam kebijakan politik.

Nah prinsip demokrasi yang hakiki itu penting untuk ditularkan, dikampanyekan, ke masyarakat desa. Dengan program *good governance*. Namun kita hati-hati dalam mempromosikan itu, *good governance* sendiri kan ada blok-bloknya. Jadi ada mahabbnya sendiri-sendiri ada sifatnya administratif, tengah, politik. Kita cenderung memilih yang politik, kalau ada administratif itu kan mudah, *good governance* *sik penting nek arep ana rapat ngundang wong tani*, seperti itu. Pemda diorganisir, baru kalau ada forum bersama itu kan kemarin itu antar elemen itu. Kalau administratif yang penting *teko yooo....*

Kalau *good governance* dalam dimensi politik itu kebijakan seperti misalnya Rembung desa itu bukan ruang kosong, banyak kepentingan yang saling berkompetisi, karena itu kita sadar oh kalau begitu ibarat maju perang itu musuh ada senjatanya.

Lurah dan pamong desa itu kan mengerti ada nya seluk beluk Undang-undang, lah masyarakat, bisnis dikasih kegiatan dalam bentuk pengetahuan, ya waktu itu rapat itu makna dari *good governance* itu. Kerana UNPD, Word bank mendorong *good governance* itu.

Teks asli Pengalaman IRE

Mulai awal tahun 2001 hingga akhir 2002, IRE menggelar program “Pengembangan Good Governance Dalam Konteks Otonomi Desa” di bawah dukungan The Ford Foundation. Kami memilih lima desa sasaran, yang sekaligus sebagai langkah penguatan atas kegiatan sebelumnya, yakni: Desa Wukirsari Kec. Imogiri (Yogyakarta), Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Desa Grogol Kec. Weru, Desa Gadungan Kec. Wedi, Desa Duwet Kec. Ngawen (Jawa Tengah). Selain untuk penguatan forum warga, program tersebut diarahkan pada beberapa sasaran. Pertama, mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih transparan, bertanggungjawab serta responsif. Kedua, memperkuat Badan Perwakilan Desa, sebagai sebuah institusi demokrasi perwakilan di tingkat desa, terutama peran mereka dalam melakukan kontrol terhadap eksekutif, merumuskan perencanaan partisipatif, kemampuan legal drafting, daya tanggap mereka sebagai lembaga perwakilan, dan lain-lain. Ketiga, mendorong terciptanya pasar lokal yang kompetitif, yang memungkinkan perluasan akses bagi masyarakat lapisan bawah. Dari aspek ini, para pengusaha kecil di desa bisa punya akses yang lebih luas dan mudah ke pusat modal (bank), informasi tentang produksi dan pemasaran, pusat-pusat perdagangan, dan pelayanan yang baik dari pemerintah. Termasuk dalam **konteks ini, IRE juga hendak mendorong pengembangan fund raising di tingkat desa, melalui pengembangan badan usaha milik desa.** Keempat, mendorong elemen-elemen masyarakat sipil lebih dinamis dan partisipatif. Dari aspek masyarakat ini, diharapkan tumbuh civil engagement yang dinamis, kepedulian masyarakat terhadap persoalan lokal, partisipasi mereka dalam pengelolaan desa, dan sebagainya.

Dari pengalaman di atas mengenai IRE juga hendak mendorong pengembangan fund raising di tingkat desa itu maksudnya adlah penerimaan desa selain dari pungutan retribusi oleh masyarakat maka dari itu pemerintah kaputapatan atau pemerintah pusat.Fundraising maksudnya ada potensi kas desa jadi dia menngkatkan pendanaan mandiri melalaui format keleagaan BUMDes, mendorong keperintah desa.

Misalnya di desa itu ada potensi usaha air bersih itu bisa dialirkan ke warga trus air bersih itu dikelola oleh desa dengan lembaga BUMDes atau kios desa, pasar desa wukirsari. Dengan mengembangkan pasae desa itu nanti ada kios-kios untuk di sewa untuk persewaan, atau orang yang dagang memberikan retribusi itu yang namanya fundraising desa.

kegiatan ”Revitalising Craftwomen of Batik Cottage Industry in Bantul”

Maksudnya adanya penguatan di sana itu itu kan ada perumpuan pembatik, perempuan, pegarajn pembatik.

*San gemp*a membantu sumber-sumber penghidupan, karena harga-harga mahal, kantor-kantor masih tutup, petani tidak dapat bekerja. Ada potensi yang bisa dihidupan kembali. Namanya batik tulis hampir ditingkat dusun itu permpuan-perempuan karangkolongiriloyo, cengkehan.

- Kenapa program itu dilalasaakan padahal sebelumnya program-program yang dilalukan IRE bersifat dalam bidang politik, kenapa ini ada kecenderungan lebih pada bidang ekonomi?
- + program ini *by respon* saja karena bencana memilihkan kegiatan di situ ya kita meski kaitkan.Nek iso tata kelola indstrilisasi itu sudah ada dasar-dasar pengetahuan tentang prinsip *good goveernce*.

Jadi fokusnya itu tentang batik, jadi dulu itu hanya bisanya canting dan disetor dari juragan batik di Yojo (Yogya). Income penghasilannya kan *thitik* (sedikit) 10, 30 an. Oleh program ini mereka didik dari mendasain, gambar pola batik, finshing, sampai menjual. Mereka sampai memuat skape mewaranai, secara income bertambah dana da pendopo gazebo untuk memamarkan hasil karya batik mereka jika ada

pameran. Juga paguyuban satu pintu batik giriloyo di paguyuban itu tidak boleh ada batik printing atau cap, harus tulis semua dan mereka ' *wooww la le jual angel*' itu karena motif-motif mereka motif klasik *kayo* sidomukti, wahyu temurun dan sebagainya, *suwe angel, nek di dol* harganya mahal, gak ada yang beli 750-1 juta perlembar.

Oleh program ini dilatih membuat dengan motif yang sederhana, kontemporer, batik tulis dijual ada yang 100 ribu, 250 ribu. Karena motifnya tidak rumit pewarnaannya tidak rumit hanya sekali tidak ada kali pewarnaan cukup sekali.

kegiatan Riset Advokasi Prakarsa Pembaharuan Tata Kelola Industrialisasi Desa untuk Penguatan Basis Ekonomi bagi Otonomi Desa

kegiatan tersebut, di satu kabupaten, jadi risetnya itu bagaimana mengelola industry-industri di bantul, seperti gerabah di jetis panjangrejo, kasongan, pucung dewe, kuwi, jadi gini, sing ngaloni warga, neng isoh gak praktek-praktek industry di panjangrejo itu nanti dipikirkan juga sama pemerintah desa, oleh tokoh-tokoh. Nah saat itu, riset seperti itu, diupayakan agar kegiatan-kegiatan industry itu ada keberlanjutan dari segi bahan baku, kemudian dari segi pasar, itu juga terjamin. Yang menjamin itu siapa? yang menjamin adalah pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun kelurahan. Nah ternyata hasil riset kita banyak yang tak tahu menahu tentang industry itu, misalnya di panjangrejo itu, '*yo ngerti du dusun jetis ada gerabah*', nanti kalau ada dinas atau apa, nek ada bantuan *yo kulo nuwun* lewat itu, tetapi mereka tidak punya program yang jelas mau mengembangkan pasar, itu yang dikhawatirkan, atau bisa menjadi masalah keberlanjutan.

Advokasi yang dilakukan mengenai program tersebut ada 3 level pertama:

1. Masyarakat yang bukan pelaku industri
2. Masyarakat pelaku industri

3. Pemerintah

Pelaku industry sak bantul dulu kita dulu kita kumpulkan membuat asosiasi industry/pengajin. Neng pucung.Tatah sungging. Pemerintah Wukirsari, mendukung lebih agresif, terbentuk dari komitmen polical will. Ada kemuan.

Pemerintah Desa setelah bermitra dengan IRE menurut saya ada perubahan kemuan untuk untk mengembangkan, pertama menyadari bahwa bahwasannya kebijakan program itu *ora mligi dipikirke karo pemerintah desa*. Pemerintah desa sangat postisitif untuk Batik itu? Kan gazebo itu tanah kas desa, diberikan dihibahkan, *trus sing mbangun itu dana dari IRE*, tetapi tanah kas desa, kerjasama.

Pelatihan

Ada undangan, tor, karangka acuan kerja, materi, ada yang d bawa pulang.

Mengenai Evaluasi

Ada beberapa metode misalnya dnean LSE menganalisa apa yang kita intervensi hasilnya seperti apa, seperti itu juga, tetapi kita tidak menggunakan LSE.

Umpamanya kita melatih *wong* Wukirsari hasilnya seperti apa kita ukur, Nah ukuranya kita kepraktetek-praktek pada saat musywarah desa, *daily activity* di pemerintah desa, *piye ki* misalnya apakah pelaynannya bagus, mislanya pelayanan untuk memenuhi prosedur, apakah *ngamuk?* *Apo* seperti itu kan sejauh mana prosesnya.

Trus juga dalam pemilu kades.

+apakah IRE di libatkan?

- Oh gak. Ini kan hanya cara melihat saja berikan itu sejauh mana dan dpahami oleh masyarakat.

Alat evaluasi, begtu itu ada evaluasi mengumpulkan mereka setelah ada kegiatan-kegiatan itu mereka kumpulkan, namanya FGD, *piye* pemerintahannya, dan setiap pelatihan pun langsung di evaluasi ada fit and propertest itu.

Harapan-harapannya

Harapan untuk masyarakat apa yang telah kita programkan mereka masih memelihara tentang *good governce* di desa mereka *bundeli* mengamalkan itu...” *nek mung ko bar kuwi gor bubar’*

Misalnya batik dilatih dan didorong agar mereka mari mati memproduksi batik tulis karena itu menjadi trandmark. Sekarang mulai kombinasi cap dan batik tulis, printing dan batik tulis, itulah hasil dari program.

- + apakah gagasan-gagasan tersebut dapat diterima dan dimengerti oleh warga?
- Ya berproses oleh karena itu sadar pelatihan itu tidak hanya 2 hari 3 hari. Bersama-sama tidak mesti *nyandak* makaa ada pendampingan. Nah itu untuk menjawab, *hah iki apa, gek kepiye iki?*

Gagasan itu tercapai atau belum di lihat dalam praktek sehari-hari misalnya dari mengungkapkan kata lidahnya ‘ *good governance*, apa bedanya dengan *good government*? Yo bagaiana menghargai perbedaan pendapat dari kita pertemuan pemerintah desa dan masyakat. Di laitih cara bicaranya juga, ke dalam pelatihan itu ada matari tentang fasiltasi tentang mengikuti rapat desa lah nanti dalam sesi pelatihan itu ada simulasinya praktek disebut rollplaying.

0DOKUMENTASI FOTO



Wawancara dengan peneliti IRE Yogyakarta



wawancara peneliti IRE Yogyakarta



wawancara Lurah Wukirsari



Wawancara mantan Lurah Wukirsari



Wawancara Dukuh Manggung



wawancara pengarjin batik



Pintu Masuk Desa Wukirsari



Kondisi desa Wukirsari



Gazebo nampak dari depan: Salah satu perwujudan dari program IRE untuk penguatan pembatik Wukirsari dengan dibangunnya gazebo untuk perkumpulan batik, pameran hasil, juga difungsikan sebagai ruang konsolidasi baik pemerintah desa maupun masyarakat sendiri. Dana dari IRE, tanah milik kas desa.

